

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut para ahli, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk atau *plural society*,¹ dari segi etnis, misalnya ada suku melayu dan ada suku Melanesia yang selanjutnya membentuk seratus suku besar dan 1.072 suku-suku *derivative* besar dan kecil. Dari segi bahasa, terdapat ratusan bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Nusantara. Dari segi pulau yang dihuni, terdapat sekitar 13.000 lingkungan kehidupan kepulauan. Dari segi sejarah politik lokal, terdapat puluhan bahkan ratusan sistem kerajaan kesukuan lama yang berpengaruh terhadap sistem stratifikasi sosial dan adat istiadat setempat sekarang. Dari segi mata pencaharian, terdapat keragaman antara kehidupan pedesaan dan perkotaan. Dari segi agama, terdapat sejumlah agama besar dunia dan sejumlah sistem kepercayaan lokal yang tersebar diseluruh wilayah Nusantara.²

Masyarakat semacam itu merupakan suatu fenomena unik dan menarik, tetapi juga bisa menjadi pangkal konflik seperti yang banyak terjadi sejak dahulu hingga kini. Di satu sisi keragaman dapat diterima oleh masyarakat sebagai sebuah keniscayaan yang disikapi dengan arif, namun di sisi lain ternyata menimbulkan masalah yang cukup kompleks.

Pada hakikatnya, bangsa kita sebagai sebuah masyarakat heterogen yang sedang tumbuh, tentu sulit untuk mengembangkan saling pengertian yang mendalam antara beraneka ragam unsur-unsur etnis, budaya daerah, bahasa ibu, dan kebudayaannya. Paling tidak tentu saling pengertian tercapai

¹ Setelah Indonesia merdeka, kemajemukan masyarakat Indonesia disebabkan oleh keadaan intern tanah air dan bangsa Indonesia sendiri. Golongan Eropa yang sebelum itu mempunyai kedudukan sangat penting di dalam masyarakat Indonesia kemudian terlempar keluar dari sistem sosial masyarakat Indonesia. Lihat Dr. Ichtijanto, "Masyarakat Majemuk dan Kerukunan Hidup Beragama", dalam Prof. Athon Mudzhar, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dalam Bingkai Masyarakat Multikultural*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005), Cet. I, hlm. 47

² Athon Mudzhar, *Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia dan Tantangan ke Depan (Tinjauan dari Aspek Keagamaan)* dalam Athon Mudzhar, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia dalam Bingkai Masyarakat Multikultural*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005), Cet. I, hlm. 1-2

barulah bersifat nominal belaka. Pola hubungan seperti itu dengan sendirinya tidak memiliki daya tahan yang ampuh terhadap berbagai tekanan yang datang dari perkembangan politik, ekonomi, dan budaya, sehingga kerukunan yang ada hanyalah kondisi yang rapuh.³

Sering kali perbenturan dalam pluralisme yang mendapat sorotan tajam adalah mengenai pluralisme agama. Karena secara historis, di negara ini agama-agama besar berkembang dengan suburnya. Dan secara sosiologis, hubungan masing-masing agama sarat dengan berbagai dinamika, terkadang akomodatif dan terkadang konfrontatif. Pola hubungan akomodatif terjadi karena masing-masing umat dapat mengaktualisasikan ajaran agamanya dengan benar sekaligus para pemeluk agama menaati dan mengakomodir nilai-nilai budaya lokal. Sedangkan mencuatnya hubungan konfrontatif disebabkan oleh sifat dan watak umat beragama, termasuk pemahaman agama yang sempit serta adanya pengaruh provokasi dari luar. Yang selanjutnya menyebabkan kerusuhan yang bernuansa agama.

Perbedaan sikap dan pandangan, apalagi perbenturan kepentingan dapat membuat ketenangan suasana sewaktu-waktu berubah menjadi kebalauan. Mereka yang tadinya saling menghormati, tiba-tiba dapat bersikap saling menyalahkan.

Dua dasawarsa terakhir ini, Indonesia sedang ditandai oleh friksi dan tensi krusial dengan warna keagamaan, misalnya konflik Kristen-Islam di Poso, Maluku sampai Paling mutakhir dan paling menonjol dalam kurun tahun 2008 hingga awal 2011 adalah pada 1 Juni 2008 terjadi penyerangan oleh FPI (Front Pembela Islam) terhadap anggota AKKBB (Aliansi Kebebasan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) yang tengah melakukan aksi di Monas, Jakarta. Pada 27 Juli 2010 masjid Syekh Ali Martaib di desa Lumban Lobu, Kec. Tapanuli Utara-Sumatera Utara dibakar oleh orang tak dikenal menjelang subuh, 06 Februari 2011 terjadi tragedi di Cikeusik, Pandeglang-Banten yaitu penyerangan terhadap Jama'ah Ahmadiyah yang menewaskan

³ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman, Kumpulan Pemikiran K. H. Abdurrahman Wahid Presiden ke-4 RI*, (Jakarta: Kompas, 1999), Cet. II, hlm. 15

empat orang dan melukai lima orang, 08 Februari terjadi perusakan tiga Gereja di Temanggung Jawa Tengah oleh massa yang tidak puas karena terdakwa kasus penistaan agama Antonius Richmon hanya divonis lima tahun penjara, serta yang terakhir adalah penyerangan pesantren di Pasuruan oleh gerombolan bermotor pada 15 Februari 2011.⁴

Sebenarnya, konflik-konflik tersebut tidak selalu berdasarkan pertimbangan keagamaan, tetapi juga karena faktor kebangsaan, kesejarahan, kesenjangan sosial-ekonomi dan politik, hegemoni kultural, kekuasaan teritorial, dan sebagainya. Meskipun demikian, tampak bahwa pertimbangan religiusitas sedikit banyak mengandung semangat kebencian pemeluk suatu agama *vis a vis* pemeluk agama lainnya.⁵

Menurut Yenni Wahid⁶, kekerasan berbau SARA terjadi karena ada pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia yang majemuk. Mereka membenturkan hal-hal yang berbeda, juga ada keinginan untuk memimpin ruang-ruang tertentu namun rela mengacaukan hubungan yang telah harmonis. Serta ada pula penyebab lain, terutama faktor ekonomi yang bisa menyebabkan seseorang menjadi frustrasi lalu mudah ditawarkan untuk menjadi *mujahid* dengan mengikuti kelompok yang menjanjikan surga dan kemuliaan.⁷

Agama dewasa ini ditantang dan diuji oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesatnya,⁸ agama-agama besar

⁴ Fauzan Dj, "Kekalahan Negara atas Kekerasan Berlatar Agama", *Suara Merdeka*, Semarang, 20 Februari 2011, hlm 4

⁵ Abdul Dubbun Hakim, "Islam, Inklusivisme, Dan Kosmopolitanisme", dalam Abdul Dubbun Hakim, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan, Refleksi atas Pemikiran Nurcholis Madjid* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 3-4

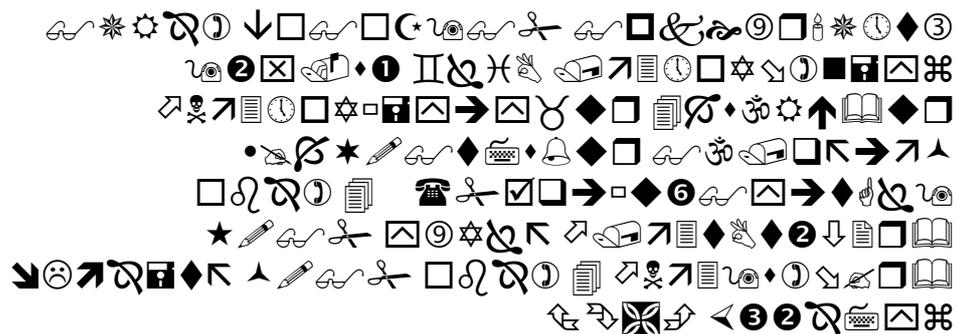
⁶ Yenni Wahid bernama asli Zannuba Arrifah Chafsoh, putri ke-2 KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah Direktur The Wahid Institut 2004-sekarang.

⁷ Zannuba Arrifah Chafsoh, "Perangi Ahmadiyah Dengan Dakwah", *Suara Merdeka*, Semarang, 20 Februari 2011, hlm. 2

⁸ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berasal dari munculnya revolusi industri yang berlangsung di beberapa masyarakat Barat terutama pada abad ke- 19 dan awal abad ke- 20. Revolusi industri bukanlah peristiwa tunggal, melainkan terdiri dari beberapa perkembangan yang saling terkait dan berpuncak pada transformasi dunia Barat dari sistem pertanian menuju sistem industri besar-besaran. Dengan munculnya pabrik-pabrik sebagai buah dari kemajuan teknologi. Lihat George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), cet. II, hlm. 7

dunia, Yahudi, Kristen, dan Islam disadari ataupun tidak telah memasuki periode krisis yang akut dan berlangsung secara kontinyu. Krisis tersebut karena agama-agama sudah tidak mampu memberikan solusi-solusi alternatif bagi manusia modern dalam ragam masalah kehidupan mereka.

Adanya keanekaragaman corak beragama adalah fenomena empiris historis yang tidak mungkin kita hindari. Berhadapan dengan realitas tersebut setiap umat beragama disapa untuk menyikapi adanya pluralitas tersebut tanpa mengambil sikap yang eksklusif, partikularis, dan intoleran dalam hidup di tengah-tengah kemajemukan. Sebenarnya, pluralitas keagamaan adalah sebuah kehendak Tuhan yang tidak akan berubah sehingga keberadaannya tidak mungkin ditolak atau ditawar.⁹ Sikap mental yang apresiatif dan inklusif terhadap adanya keanekaragaman agama tersebut sejalan dengan semangat nash al-Qur'an surat al-Hujurat: 13



Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁰

Jika dicermati secara mendalam, Allah SWT. Secara tegas menyatakan melalui firman-Nya tersebut bahwa terdapat kemajemukan di muka bumi ini. Adanya laki-laki dan perempuan serta perbedaan suku bangsa harus diterima sebagai kenyataan dan berbuat sebaik mungkin atas dasar keniscayaan tersebut. Bahkan kita disuruh untuk menjadikan pluralitas tersebut dengan

⁹ Abdul Dubbun Hakim, *op. cit.* hlm. 9-10

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al Huda Kelompok Gema Insani, 2005), hlm. 518

berinteraksi sosial sebagai instrumen untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah SWT.

Sejalan dengan firman tersebut, maka pluralitas umat meningkat menjadi pluralisme. Yaitu sistem nilai yang memandang optimis-positif terhadap keanekaragaman dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.

Dalam sejarah perkembangan agama Islam, diketahui bahwa hijrahnya Nabi ke Madinah bukan bertujuan untuk membentuk negara Islam, melainkan hanya untuk menjamin keamanan masyarakat agamanya serta demi kondisi-kondisi yang dibutuhkan bagi penyiaran agama Islam. Selain itu Nabi juga ingin mengimplementasikan perintah-perintah Allah SWT. di Makkah untuk diterapkan di Madinah. Di Madinah¹¹, Nabi mengeluarkan sebuah Piagam¹² yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas, dengan menekankan kerjasama seerat mungkin dengan sesama kaum Muslimin dan menyerukan kepada orang-orang Muslim dan Yahudi untuk bekerjasama demi keamanan mereka bersama.¹³

Pluralisme merupakan kenyataan bahwa dalam suatu kehidupan manusia terdapat keragaman suku, ras, budaya, dan agama. Keragaman itu bisa terjadi karena adanya faktor lingkungan tempat manusia hidup yang berbeda-beda. Lingkungan empat musim bagi seseorang akan membuat orang tersebut memiliki karakter dan pembawaan yang berbeda dengan orang yang hidup dalam lingkungan dua musim.

Menurut Nurcholis Madjid, Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama¹⁴, yang justru hanya menggambarkan kesan

¹¹ Masyarakat Madinah terkenal sebagai masyarakat plural, terdiri dari berbagai macam suku yang sering berselisih, bermacam agama dan kepercayaan, serta beraneka profesi penduduknya.

¹² Teks Piagam Madinah ditetapkan bersama Sahabat Anshar dan beberapa Kepala Keluarga dari Makkah, teks tersebut terdiri dari 47 pasal.

¹³ Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 2000), hlm.13

¹⁴ Para ahli ilmu perbandingan agama membagi agama secara garis besar ke dalam dua bagian. *Pertama*, kelompok agama yang diturunkan oleh Tuhan melalui wahyu-Nya yang disebut sebagai agama *samawi* atau agama langit (antara lain; Islam, Yahudi dan Nashrani). *Kedua*,

fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme.

Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.¹⁵ Dengan demikian, hal tersebut menegaskan adanya masalah besar dalam kehidupan beragama yang ditandai oleh kenyataan pluralisme dewasa ini. Salah satu masalah besar dari paham pluralisme yang telah menyulut perdebatan abadi sepanjang masa menyangkut masalah keselamatan adalah bagaimana suatu teologi dari suatu agama mendefinisikan dirinya di tengah agama-agama lain.¹⁶

Dari uraian tersebut, menjadi nyata bagi kita bahwa masalah pokok dalam hal hubungan antarumat beragama adalah pengembangan rasa saling pengertian yang tulus dan berkelanjutan. Kita akan menjadi bangsa yang kukuh, kalau umat agama-agama yang berbeda dapat saling mengerti satu sama lain, bukan hanya sekedar saling menghormati. Yang diperlukan adalah rasa saling memiliki (*sense of belonging*), bukannya hanya saling bertenggang rasa satu terhadap yang lain.¹⁷

Sikap mental ini kemudian berubah menjadi eksklusivisme, sektarianisme, dan intoleransi antarumat beragama sehingga terjadilah konflik-konflik dan perang atas nama agama. Realitas empirik inilah yang memprihatinkan kita semua. Namun, justru karena itulah dialog antaragama menjadi sangat penting.¹⁸

kelompok agama yang didasarkan pada hasil renungan mendalam dari tokoh yang membawanya sebagaimana terdokumentasikan dalam Kitab Suci yang disusunnya, agama demikian disebut sebagai agama *ardli* atau agama bumi (seperti; Hindu, Budha, Majusi, Konghucu, dsb.), lihat Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 119

¹⁵ Budhi Munawwar-Rachman, *Islam Pluralis, Wacana Kesetaran Kaum Beriman*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 39

¹⁶ *Ibid*, hlm. 40

¹⁷ Abdurrahman Wahid, *op. cit*, hlm. 16

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4

Kecenderungan sekelompok kecil umat Islam yang sering bersikap keras terhadap penganut agama lain menurut Abdurrahman Wahid merupakan proses pendangkalan agama. Pendangkalan ini muncul karena pengaruh politik Islam di Timur Tengah di mana Islam sudah dijadikan ideologi atau komoditas politik. Proses pendidikan dan dakwah Islam yang cenderung bersifat memusuhi, mencurigai, dan tidak mau mengerti agama lain merupakan faktor lain yang memperburuk hubungan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini dilakukan baik oleh mubalig maupun guru-guru di sekolah. Padahal tidak ada ayat atau hadis nabi yang memerintahkan kaum Muslim bersikap keras demikian, apalagi terhadap agama-agama samawi.¹⁹

Pluralisme yang ditekankan Abdurrahman Wahid adalah pluralisme dalam bertindak dan berpikir. Pluralisme dalam bertindak mensyaratkan seseorang untuk tidak membatasi pergaulan dengan orang lain (eksklusif) meskipun berbeda keyakinan. Pluralisme dalam berpikir adalah kesediaan untuk menerima atau mengambil gagasan atau pemikiran dari kalangan lain.

Sikap hidup yang demikian merupakan realisasi dari pandangan demokratis, toleran dan pluralistik Abdurrahman Wahid. Sikap itu pula yang bisa menjelaskan keluasan pergaulan dan wawasan Abdurrahman Wahid yang ternyata bersumber dari banyak sekali ajaran, nilai moral, dan budaya yang ada di dunia termasuk faktor pendidikan yang diterima di dalam keluarga dan pendidikan formal yang ditekuninya bahkan sampai kepada keaktifannya di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Oleh sebab itu, pendidikan yang sampai sekarang masih diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter generasi muda penerus bangsa, maka melalui sistem pendidikannya, sebuah pendidikan pluralisme akan sangat dibutuhkan serta dapat memelihara dan berupaya menumbuhkan pemahaman yang inklusif pada anak bangsa. Dengan suatu orientasi untuk memberikan kesadaran akan pentingnya sikap saling menghargai, menghormati dan bekerja sama dengan agama-agama lain.

¹⁹ Abdurrahman Wahid, "Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (ed), *Passing Over: Melintas Batas Agama*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 51-54

Mencermati realitas tersebut, pemikiran mengenai pentingnya pendidikan pluralisme terutama bagi bangsa Indonesia yang majemuk menurut pandangan seorang tokoh yang sangat mengedepankan pluralisme, baik pemikirannya yang diaktualisasikan dalam bentuk tulisan di berbagai media, maupun bentuk sikap dan tindakan riil yang dilakukannya, entah itu ketika menjabat sebagai presiden, sebelum maupun sesudah menjabat, sangatlah menarik untuk dikaji. Dan untuk penelitian ini, pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pendidikan Pluralisme akan ditinjau dalam perspektif Pendidikan Islam, sehingga penelitian ini diberi judul **KONSEP PENDIDIKAN PLURALISME MENURUT ABDURRAHMAN WAHID DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan kerangka pemikiran di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji:

1. Bagaimana Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Konsep Pendidikan Pluralisme?
2. Bagaimana Konsep Pendidikan Pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dalam Perspektif Pendidikan Islam?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari beberapa permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Konsep Pendidikan Pluralisme
 - b. Mengetahui bagaimana Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang Konsep Pendidikan Pluralisme jika dilihat dalam Perspektif Pendidikan Islam
2. Manfaat penelitian

Harapan dari penulisan skripsi ini adalah agar bermanfaat dalam memberikan gambaran tentang Konsep Pendidikan Pluralisme untuk dijadikan pegangan sesama praktisi pendidikan yang sekiranya dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi nyata dalam memecahkan berbagai masalah berbau SARA yang bisa menimbulkan dampak ketegangan di antara kelompok, suku, serta pemeluk agama yang dihadapi oleh masyarakat plural, seperti di Indonesia.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan dan memahami pokok kajian penelitian ini, maka dirasa perlu untuk mengemukakan makna dan batasan-batasan istilah dalam judul tersebut agar mudah dipahami secara konkret dan lebih operasional. Adapun penjelasan tersebut adalah:

1. Konsep

Istilah Konsep dalam *Kamus Ilmiah Populer* diartikan sebagai ide umum, pengertian, pemikiran, rancangan, serta rencana dasar²⁰

2. Pendidikan Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata *plural* (Inggris) yang berarti jamak, dalam arti terdapat keanekaragaman dalam masyarakat. Dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Pluralisme diartikan sebagai keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya.²¹

Pendidikan Pluralisme merupakan pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka visi pada cakrawala yang semakin luas, mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama sehingga kita

²⁰ Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 362

²¹ Syamsul Ma'arif, *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2005), hlm. 13

mampu melihat kemanusiaan sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan maupun kesamaan cita-cita.²²

3. Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mengandung arti upaya membimbing, mengarahkan, dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.²³

E. Tinjauan Pustaka

Sejak menjabat sebagai Ketua PBNU, ketika Almarhum Abdurrahman Wahid diangkat menjadi Presiden, bahkan setelah wafatnya Beliau pada 30 Desember 2010 yang lalu, banyak pakar yang melakukan penelitian, pengumpulan berbagai tulisan-tulisan Beliau yang tercecer di surat kabar dan makalah-makalah, serta melakukan analisa tentang sikap, langkah kebijakan maupun pemikiran-pemikiran mantan Presiden RI ke-4 ini, baik itu pemikiran-pemikiran Beliau tentang politik, ekonomi, budaya, agama, pesantren, dan sebagainya.

Penelitian tentang Beliau memang sudah banyak dilakukan oleh beberapa pakar, misalnya; Al-Zastrouw Ng, karyanya berjudul “Gus Dur, Siapa sih Sampeyan? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur”,²⁴ mengungkapkan bahwa Gus Dur sebagai tokoh besar yang memiliki gagasan besar pula, tidak jarang gagasan-gagasan tersebut menimbulkan salah pengertian yang berujung pada terjadinya perdebatan, ketika gagasan tersebut disosialisasikan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pandangan Gus Dur tentang agama juga dengan gamblang dipaparkan dalam buku ini bahwa sekalipun agama itu mengandung ajaran tunggal, namun karena dia dipahami oleh umat yang memiliki latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda, maka dalam prakteknya menjadi berbeda dan plural.

²² *Ibid*, hlm. 92

²³ Abudin Nata, *op. cit.* hlm. 339-340

²⁴ Zastrouw Ng, *Gus Dur, Siapa sih Sampeyan? Tafsir Teoritik atas Tindakan dan Pernyataan Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga, 1999)

Sebenarnya umat beragama memiliki kebebasan untuk mengubah simbol dan ritus yang menjadi bagian dari dimensi kebudayaan agama. Inilah yang dilakukan Gus Dur selama ini, yaitu langkah untuk membawa agama dalam nilai-nilai yang tetap relevan dengan realitas zamannya, dan agar agama memiliki fungsi yang maksimal dalam menjawab problem kehidupan, salah satunya adalah membela pluralisme dalam beragama. Atas sikapnya yang demikian, Gus Dur banyak mendapat tuduhan dan hujatan. Dia dituduh sekuler, pengkhianat umat, dan tidak membela umat Islam. Padahal, kalau dilacak secara cermat, sebenarnya Gus Dur justru berusaha memfungsikan agama secara maksimal.

”Neo-Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid”, karya Ahmad Amir Aziz, yang memberikan pencerahan bagaimana Abdurrahman Wahid membela kalangan minoritas dalam keberatannya terhadap pembentukan ICMI yang didasarkan atas kuatnya semangat membentuk “Masyarakat Islam” pada sejumlah aktifitas organisasi itu. Jika perkembangannya tidak direm, maka yang akan terjadi adalah pengabaian semangat toleransi keagamaan.²⁵ Pandangannya yang mengedepankan Universalisme Islam semakin terlihat nyata ketika Ia dalam kancah sosial dalam perpolitikan nasional, menunjukkan perhatian besar pada hak-hak kelompok minoritas.

Salah satu manifestasi dari komitmen atas pluralisme, adalah ketika menjadi presiden, Gus Dur memelopori penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan mengeluarkan Inpres No 6/2000 tanggal 17 Januari 2000, mencabut Inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Gus Dur juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 29/1998 tentang Bakorstanas dan Keppres No. 16/1990 tentang Litsus. Kedua lembaga itu dinilainya lebih banyak menimbulkan kesulitan dari pada manfaat dan secara jelas merugikan nilai-nilai hak asasi manusia.

²⁵ Ahmad, Amir, Aziz, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1999)

Perjuangan membela kaum tertindas dan termarginalkan tanpa membedakan agama dan keyakinan seseorang atau kelompok, misalnya pembelaannya terhadap Jama'ah Ahmadiyah dan sebagainya semakin menunjukkan jiwa pluralis Gus Dur. Sikap semacam itu dibentuk melalui proses panjang, di mana Ia pernah berorganisasi dan belajar di Mesir, Irak, serta beberapa negara Eropa.

Douglas E. Ramage²⁶ juga mengatakan bahwa strategi Pancasila Gus Dur tidak hanya ditujukan untuk mengoreksi perilaku kekuasaan elit negara, tetapi juga untuk mengatakan bahwa Pancasila pada dasarnya adalah sebuah kompromi politik untuk tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sebagai suatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan agama, bangsa Indonesia menerima Pancasila sebagai pernyataan ideologis tentang toleransi dan komitmen untuk menghindari lahirnya perilaku-perilaku politik yang sifatnya "eksklusif". Faktor toleransi di antara umat beragama inilah yang menurut Gus Dur harus menjadi dasar bagi pengembangan demokrasi di Indonesia.

Gejala menurunkan kemampuan masyarakat untuk memelihara sikap toleransi yang demikian itu, mendorongnya pada 1992 lewat rapat akbar untuk memperingatkan betapa bahayanya jika hal itu terus dibiarkan sejalan dengan kuatnya kecenderungan ke arah apa yang disebutnya sebagai rekonfensionalisasi politik di kalangan umat beragama. Sebab, seperti yang sudah sering kali ia katakan, tanpa toleransi di antara umat beragama maka demokrasi tidak akan pernah bisa dikembangkan.

Buku karya A. Nur Alam Bakhtiar²⁷ juga memberikan gambaran untuk mengenal Gus Dur secara dekat, baik konsep dan tindakannya. Sekalipun buku ini sedikit subjektif dalam memberikan penilaian terhadap Gus Dur, tetapi cukup menggelitik pembacanya untuk semakin mengaguminya.

Menurut Gus Dur, Prinsip pluralisme harus dilihat dalam konteks manifestasi universalisme dan kosmopolitanisme peradaban Islam, ajaran moralitas Islam yang secara teoritik bertumpu pada adanya lima buah jaminan

²⁶ Douglas E. Ramage, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), Cet. III, hlm. 115

²⁷ A. Nur Alam Bakhtiar, *99 Keistimewaan Gus Dur*, (Jakarta: Kultural, 2008)

dasar yang diberikan Islam kepada warga masyarakat, meliputi; keselamatan fisik warga masyarakat (*hifdzu al-nafs*), keselamatan keyakinan agama masing-masing (*hifdzu al-din*), keselamatan keluarga dan keturunan (*hifdzu al-nasl*), keselamatan harta benda dan milik pribadi (*hifdzu al-mal*), dan keselamatan hak milik dan profesi (*hifdzu al-milk*). Kesemuanya itu merupakan konsep yang dijadikan Gus Dur sebagai prinsip Universal Islam.²⁸

Namun, sejauh ini semua jaminan dasar itu hanya menyajikan kerangka teoritik yang tidak berfungsi tanpa didukung oleh kosmopolitanisme peradaban Islam, yang muncul dalam sejumlah unsur dominan, seperti hilangnya batasan etnik, kuatnya pluralitas budaya, dan heterogenitas politik.²⁹

Berbagai karya penelitian yang telah dipaparkan di atas memiliki keistimewaan dan corak tersendiri dalam mengkaji pemikiran serta sikap seorang tokoh besar bernama Abdurrahman Wahid, karena kajian dan cara pandang yang digunakan berbeda-beda. Begitu juga dalam penelitian ini, pencarian sebuah konsep Pendidikan Pluralisme dalam pandangan Beliau dilihat dari perspektif Pendidikan Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*library research*). Artinya penelitian yang bersifat kepustakaan murni yang data-datanya didasarkan/diambil dari bahan-bahan tertulis, baik yang berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik/tema pembahasan skripsi ini.³⁰

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi pemikiran tokoh yaitu dengan pendekatan *sosio histories* dan *factual histories*, pendekatan *sosio histories* yaitu penelitian yang berupaya memeriksa secara kritis peristiwa, perkembangan masa lalu, kemudian

²⁸ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan, Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute: 2007), hlm. 4-5

²⁹ Ibid, hlm. 9

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63

mengadakan interpretasi terhadap sumber-sumber informasi.³¹ Sedangkan *factual histories* yaitu suatu pendekatan dengan mengemukakan sejarah fakta mengenai tokoh.³²

2. Sumber-Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber Primer dalam hal ini adalah hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinil.³³ Sumber primer ini berupa buku-buku dan karya ilmiah yang digunakan sebagai referensi utama, dan sebagian besar penulis gunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun sumber primer tersebut adalah buku-buku karya Abdurrahman Wahid, di antaranya; Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, Islamku Islam Anda Islam Kita, Gus Dur Bertutur, Prisma Pemikiran Gus Dur, Dialog kritik dan Identitas Agama, dan lain sebagainya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang ia deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu teori.³⁴ Sumber sekunder ini digunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk lebih memperkaya isi skripsi, dan sebagai bahan pelengkap dalam pembuatan skripsi ini. Sumber ini terdiri dari buku-buku atau karya ilmiah lain yang masih ada hubungannya dengan isi skripsi. Misalnya; Biografi Gus Dur, Dialog Kritik dan Identitas Agama, Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil, 41 Kebesaran Gus Dur, The Beauty of Islam, Pendidikan Pluralisme di Indonesia, karya ilmiah Islam dan Pendidikan Pluralisme, dan sebagainya.

³¹ Komaruddin, *Kamus Research*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 120

³² Anton Bekker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 61

³³ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 83

³⁴ *Ibid*, hlm. 84

3. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data, ditekankan pada metode hermeneutika, yang secara etimologis berarti penafsiran atau interpretasi. Menurut istilah, Hermeneutik diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti.³⁵ Dengan Metode tersebut, bisa ditafsirkan tulisan KH. Abdurrahman Wahid dengan menggunakan bahasa sendiri.

G. Sistematika Pembahasan Skripsi

Untuk mempermudah penjelasan, pembahasan, penelaahan pokok-pokok masalah yang dikaji, maka disusunlah sistematika sebagai berikut:

1. Bagian muka, pada bagian ini termuat halaman judul, kata pengantar dan daftar isi.
2. Bagian isi, pada bagian ini termuat:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, mengapa topik ini diambil. Dalam menghindari meluasnya pembahasan skripsi ini, maka dijelaskan penegasan istilah dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian skripsi yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber-sumber data, metode analisis data, serta dijelaskan juga mengenai sistematika pembahasan skripsi.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori yang menguraikan tinjauan umum tentang pendidikan pluralisme dan pendidikan Islam. Yaitu pendidikan pluralisme yang meliputi: pengertian dan sejarah munculnya pluralisme, pengertian dan sejarah munculnya pendidikan pluralisme, dasar dan tujuan pendidikan pluralisme. Juga diuraikan tentang pendidikan Islam yang meliputi: pengertian pendidikan Islam, sumber atau dasar pendidikan Islam, tugas dan fungsi pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam.

BAB III : Pada bab ini diuraikan tentang pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai konsep pendidikan pluralisme. Yaitu biografi

³⁵ E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 23

Abdurrahman Wahid yang meliputi: biografi, karya-karya Abdurrahman Wahid, penghargaan-penghargaan yang diperoleh Abdurrahman Wahid. Serta diuraikan tentang pemikiran Abdurrahman Wahid mengenai konsep pendidikan pluralisme yang meliputi: dasar pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid, pandangan pluralisme Abdurrahman Wahid, cara menyikapi pluralisme, pluralisme dalam konteks keindonesiaan.

BAB IV: Bab ini merupakan bab pembahasan dari pokok masalah yang diajukan. Dalam hal ini merupakan analisis terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid tentang konsep pendidikan pluralisme dalam perspektif pendidikan Islam. Yaitu termuat analisis tentang konsep pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid yang meliputi: terbentuknya watak pluralisme Abdurrahman Wahid, konsep pendidikan pluralisme Abdurrahman Wahid. Dijelaskan pula tentang konsep pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari pendidikan Islam yang meliputi: *maqashid al-syari'ah* sebagai prinsip pendidikan pluralisme, konsep pendidikan pluralisme menurut Abdurrahman Wahid ditinjau dari pendidikan Islam. Serta dijelaskan mengenai relevansi pemikiran Abdurrahman Wahid dalam konteks keindonesiaan yang meliputi: Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara Islam, memperjuangkan penegakan demokrasi, HAM, dan pluralisme di Indonesia serta solusi bagi permasalahan kemajemukan di Indonesia.

BAB V : Pada bagian ini termuat simpulan serta saran dan penutup.

3. Bagian akhir, pada bagian ini termuat: kepustakaan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.